BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN SKPD

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Tengah yang berkaitan dengan pelayanan bidang Koperasi dan UMKM, diidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Belum optimalnya Perencanaan maupun hasil kajian yang disusun Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Tengah baik oleh internal maupun oleh Dinas Teknis terkait;
2. Optimalisasi koordinasi antara institusi perencana dengan pemegang otoritas penganggaran, untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, sehingga program dan kegiatan yang telah direncanakan tidak tereduksi di dalam proses penganggaran;
3. Masih kurangnya SDM yang memiliki skill dan kompetensi sesuai dengan tugas dan kewajiban utamanya;
4. Belum terkelolanya sumber data dan informasi yang mendukung proses Pembinaan dan pelayanan sehingga sumber data masih Minim;
5. Belum tersusunnya standar kinerja yang terukur bagi setiap jabatan struktural maupun fungsional serta pelaksana di lingkungan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Tengah
6. Belum optimalnya alokasi anggaran untuk pengembangan SDM dan Pelaksanaan program kegiatan sesuai TUPOKSI

Untuk menentukan Isu-isu strategis dirumuskan berdasarkan hasil evaluasi terhadap tupoksi, kinerja pelayanan dan juga tantangan eksternal. isu strategis merupakan keadaan saat ini yang berpotensi akan menjadi hambatan dan kendala dalam pengembangan organisasi serta peluang dan tantangan yang berasal dari sisi eksternal seperti perkembangan ekonomi dan sosial di berbagai level.

Hal ini Sesuai dengan Permendagri 54/2010, Informasi yang diperlukan dalam perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi ini diantaranya adalah :

- a. Hasil analisis gambaran pelayanan SKPD; dan
- b. Hasil analisis komparasi Renstra K/L dan Renstra-SKPD provinsi.

Tabel 3.1.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Tengah

Aspek Kajian	Capaian Kondisi Saat Ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal (Ke-wenangan SKPD)	Eksteral (diluar kewenangan SKPD)	
Hasil Analisis gambaran pelayanan pelayan SKPD	Meningkatnya jumlah koperasi aktif	IKK	Rendahnya kualitas kelembagaan & Usaha Koperasi	Struktur dan persiangan ekonomi yang lebih bertumpu pada modal	Masih terbatasnya tenaga perkeroperasian yang kompeten untuk melakukan pembinaan di bidangnya
	Meningkatnya kontribusi UMKM terhadap PDRB	IKK	Rendahnya produktivitas dan Daya Saing KUMKM	Globalisasi perdagangan menyebabkan persaingan akan semakin ketat	<ul style="list-style-type: none"> Masih terbatasnya dampak fasilitasi bagi peningkatan akses permodalan bagi koperasi dan UMKM Database UMKM belum sepenuhnya update dan detail
	Jumlah LKM yang aktif	IKK	Terbatasnya akses sumber daya produktif	Lembaga keuangan formal yang belum optimal memberi bantuan keuangan/kredit pd KUMKM terkendala jaminan	Masih terbatasnya sumberdaya dalam memfasilitasi dan mengembangkan LKM (yang berbadan Hukum Kop. maupun yang tidak berbadan hukum Koperasi)
Hasil Analisis Renstra K/L dan Renstra Provinsi	Penumbuhan Kinerja Kelembagaan dan Usaha Koperasi	IKK	Rendahnya kinerja Koperasi	Regulasi perkeroperasian masih belum konsisten	<ul style="list-style-type: none"> Masih terbatasnya jumlah tenaga perkeroperasian yang kompeten Masih terbatasnya fasilitasi dan pendampingan dikarenakan cakupan koperasi di Kalteng yang luas
	Penumbuhan Wirausaha Baru		Rendahnya pertumbuhan wirausaha baru	Paradigma pembangunan belum sepenuhnya berorientasi kewirausahaan	Masih terbatasnya jumlah tenaga perkeroperasian dan UMKM yang kompeten

Selain dinamika internal tersebut, dalam upaya Pembangunan Koperasi dan UMKM di Kalimantan Tengah perlu memperhatikan perkembangan dinamika internasional, nasional, dan regional. Hasil identifikasi tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.1.2. Hasil Identifikasi isu isu strategis dari sisi eksternal

No.	Internasional	Nasional	Kalimantan Tengah
1.	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Dunia meskipun relative kecil	Ekonomi Makro Stabil - sektor riil masih belum optimal (primer membesar)	Tingkat Kemiskinan masih relative tinggi, diiringi kenaikan kesenjangan
2.	Globalisasi perdagangan khususnya block regional seperti AEC/MEA	Daya saing Indonesia masih dibawah Singapura, Malaysia dan Thailand terutama dalam AEC/MEA	Daya Saing Kalimantan Tengah dibawah Provinsi Lain di Indonesia
3.	Pertumbuhan Populasi Dunia dan tantangan kedepan	Demografi dan kesempatan kerja terbatas	Jumlah Pengangguran dan Angkatan Kerja baru relative besar
4.	Internasionalisasi Koperasi (Koperasi berstandar Internasional)	Daya Saing Koperasi masih lemah dan terbatas	Daya Saing Koperasi di Kalimantan Tengah masih rendah

5.	Kesenjangan dalam struktur ekonomi dunia	Kontribusi KUMKM dalam pembentukan PDB tinggi namun masih belum berdaya saing	Kontribusi KUMKM dalam pembentukan PDRB Kalimantan Tengah cukup relevan namun belum berdaya saing
6.	Kesenjangan negara maju dan negara berkembang semakin melebar	Infrastruktur khususnya diluar pulau jawa terutama DI Daerah Indonesia Timur masih sangat kurang (ekonomi dan membuka keterisolasian)	Infrastruktur masih perlu ditingkatkan guna memacu pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah
7.	Gerakan Global menuju ekonomi hijau (green economic)	Kegiatan ekonomi masih belum ramah lingkungan dan berbasis primer sehingga nilai tambah menjadi rendah ; dan potensi Laut masih belum optimal	Pengembangan Ekonomi berbasis keunggulan kearifan local melalui OVOP dan Produk KUMKM yang Ramah Lingkungan

3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Sesuai dengan Visi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang dituangkan dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah adalah ***Kalteng Maju, Mandiri & Adil untuk Kesejahteraan Segenap Masyarakat Menuju Kalteng BERKAH (Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis)***.

Dari Visi tersebut, kemudian dijabarkan kedalam 8 (delapan) misi, yaitu sebagai berikut :

1. Pemantapan Tata Ruang Wilayah ;
2. Pengelolaan Infrastruktur ;
3. Pengelolaan Sumber Daya Air, Pesisir dan Pantai ;
4. Pengendalian Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, Penanggulangan Kemiskinan ;
5. Pemantapan Tatakelola Pemerintah Daerah ;
6. Pendidikan, Kesehatan dan Pariwisata ;
7. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam ;
8. Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Tengah mendukung pencapaian target pembangunan Kalimantan Tengah dari misi ke-4 yaitu ***Pengendalian Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, Pengentasan Kemiskinan***. Misi tersebut memiliki tujuan Meningkatkan aktivitas ekonomi dan kualitas kelembagaan dan usaha Koperasi dan UMKM. Dengan memperhatikan Visi, Misi serta Kebijakan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, tersebut maka yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Tengah sebagai berikut :

Visi	Misi	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Kalteng Maju, Mandiri & Adil untuk Kesejahteraan Segenap Masyarakat Menuju Kalteng BERKAH (Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis	Pengendalian Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, Pengentasan Kemiskinan	1. Meningkatkan Daya Saing KUMKM melalui Peningkatan volume usaha UMKM, & kualitas kelembagaan serta usaha koperasi	1. Memperluas akses permodalan bagi UMKM melalui lembaga keuangan bank maupun non-perbankan	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan peranan Koperasi dan UMKM dalam perekonomian • Perluasan jaringan akses permodalan KUMKM melalui peran stimulus pemerintah, lembaga keuangan bank dan non-bank, mengutamakan pendampingan kepada KUMKM untuk kelancaran pembiayaan usaha, serta penjaminan • Peningkatan peran Bank Indonesia maupun bank pelaksana untuk memperbesar pangsa kredit KUR kepada KUMKM • Peningkatan perluasan jaringan LKM Non Bank dan bank pelaksana lainnya di wilayah-wilayah strategis untuk mendukung kemudahan akses permodalan bagi UMKM
		2. Meningkatnya Kontribusi UMKM dan Koperasi dalam perekonomian Daerah	2. Meningkatkan peran Koperasi dan UMKM dalam aktivitas perekonomian	<ul style="list-style-type: none"> • Perluasan cakupan kelompok sasaran, substansi pendidikan dan pelatihan Kapasitas KUMKM untuk efisiensi dan efektivitas proses usaha, termasuk manajemen pemasaran • Optimalisasi peran KUMKM terhadap pembentukan PDRB, dan penciptaan lapangan kerja melalui fasilitasi skema pembiayaan, peningkatan daya saing, perluasan dan penguatan kelembagaan, serta peningkatan usaha koperasi • Penyediaan dan perluasan akses pasar bagi KUMKM dengan mengutamakan tujuan pasar dalam negeri, selanjutnya didorong untuk mampu bersaing ke pasar regional dan internasional • Peningkatan dukungan pengembangan usaha mikro tradisional dan pengrajin melalui Pembinaan sentra-sentra produksi/klaster disertai dukungan penyediaan infrastruktur yang makin memadai • Peningkatan dan pengembangan lembaga keuangan mikro (LKM) pedesaan utk mendukung pengembangan koperasi, serta usaha mikro & kecil • Peningkatan Kapasitas dan kualitas SDM pengelola koperasi melalui pelatihan untuk mendukung pengembangan Koperasi (Koperasi Jasa, Koperasi Produsen, dan Koperasi Konsumen) termasuk Kopwan dan Koppontren
			3. Meningkatkan peran Koperasi dan UMKM dalam perekonomian Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan dukungan pengembangan pasar tradisional dalam rangka menumbuhkan UMKM dan Koperasi dalam pembentukan PDB Daerah • Peningkatan dukungan dalam penumbuhan jumlah tenaga kerja sector koperasi dan UMKM • Peningkatan dukungan dan pengembangan UMKM dan koperasi dalam ekspor non migas • Peningkatan dukungan dan pengembangan Koperasi dan UMKM dalam investasi • Peningkatan Dukungan dan penataan dan pengembangan PKL

Visi	Misi	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		3 Meningkatkan jumlah wira usaha baru (WUB)	4 Meningkatkan jiwa kewirausahaan bagi calon wirausaha baru	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan tumbuhnya wirausaha kelas Kecil dan menengah baru yang bergerak di sektor UMKM melalui pelatihan budaya usaha, kewirausahaan, bimbingan teknis manajemen usaha, penggunaan teknologi tepat guna, dan akses permodalan ; serta pengembangan usaha melalui pendampingan pada PLUT-KUMKM
		4 Meningkatkan volume usaha ekonomi kaum perempuan	5 Meningkatkan kualitas ekonomi produktif berbasis gender dlm pemenuhan hak-hak dasar untuk menanggulangi kemiskinan	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan dan perluasan jaringan usaha, dan akses permodalan (kredit usaha) bagi perempuan melalui pengembangan lembaga keuangan non perbankan • Peningkatan peran perempuan dlm pengembangan usaha ekonomi produktif, melalui berbagai pelatihan keterampilan, dan pendampingan melalui PLUT-KUMKM untuk meningkatkan kapasitas usaha ekonomi produktif perempuan • Penguatan manajemen kelembagaan ekonomi produktif perempuan untuk meningkatkan efisiensi skala usaha ekonomi kaum perempuan • Peningkatan fasilitasi sarana dan prasarana dalam rangka penguatan dan pengembangan ekonomi kaum perempuan

Faktor – Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD yang dapat memengaruhi Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : " Kalteng Maju, Mandiri & Adil untuk Kesejahteraan Segenap Masyarakat Menuju Kalteng BERKAH (Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis)				
No.	Misi / Sasaran / Program / Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
	1) Pemantapan Tata Ruang Wilayah ; 2) Pengelolaan Infrastruktur ; 3) Pengelolaan Sumber Daya Air, Pesisir dan Pantai ; 4) Pengendalian Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, Penanggulangan Kemiskinan ; 5) Pemantapan Tatakelola Pemerintah Daerah ; 6) Pendidikan, Kesehatan dan Pariwisata ; 7) Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam ; 8) Pengelolaan Pendapatan Daerah.	1) Keterbatasan Jangkauan Pelayanan, fasilitasi dan Pembinaan KUMKM 2) SDM KUMKM masih rendah 3) SDM Pembina Koperasi dan UMKM sangat sedikit	1) Keterbatasan Anggaran / alokasi anggaran yang relatif kecil 2) Belum dimilikinya data seluruh potensi KUMKM secara up to date karena penyebaran KUMKM yang tidak merata 3) Kurangnya sinergitas antara SKPD dan dengan Stekholders	1) Adanya komitmen Pemda dalam pengembangan KUMKM 2) Banyaknya jumlah Perbankan dan pengusaha besar yang terdapat di Kalimantan Tengah 3) Tingginya jumlah dan aktivitas para pelaku usaha mikro dan kecil

1. Penjelasan Faktor Penghambat

a. Keterbatasan Anggaran / Alokasi Anggaran Relatif Kecil

Uraian	2012 (Rp.000)	2013 (Rp.000)	2014 (Rp.000)	2015 (Rp.000)
Belanja Pembangunan urusan KUMKM	5.948.458,8	5.082.345,9	4.808.211,1	5.852.678,1
PAD Provinsi	981.769.700,0	1.093.821.480,0	1.253.716.040,0	1.174.969.260,0
% Belanja Pem-bangunan KUMKM terhadap PAD	0,60 %	0,46 %	0,38 %	0,49 %
Realisasi APBD	2.514.031.000,0	2.809.096.000,0	3.129.695.000,0	3.252.748.000,0
% Belanja Pem-bangunan KUMKM terhadap APBD	0,23 %	0,18 %	0,15 %	0,17 %

Dengan melihat tabel di atas terlihat bahwa jumlah Belanja Pembangunan Urusan KUMKM masih sangat jauh dari ideal dan dibawah 1 % dari Total PAD dan Realisasi APBD. Selain itu trend belanja pembangunan KUMKM terhadap PAD sejak tahun 2012 sampai dengan 2015 mengalami penurunan.

Dengan memperhatikan kondisi tersebut tentunya daya dorong terhadap perkembangan UMKM dan Koperasi pun tidak akan berjalan secara maksimal terlebih dalam pembangunan urusan KUMKM merupakan urusan pembangunan wajib.

b. Belum dimilikinya Data UMKM secara Lengkap dan Up to Date

Salah satu karakteristik UMKM, khususnya usaha mikro adalah sangat cepatnya usaha tersebut bermunculan namun seringkali banyak pula yang berhenti. Dengan jumlah SDM pembina yang sangat sedikit untuk bidang UKM serta tingginya biaya untuk melakukan survey lapangan di seluruh wilayah Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah, Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2015 baru memiliki data UKM sebanyak 31.033 unit usaha. Sedangkan apabila melihat hasil data BPS pada tahun 2015, jumlah usaha mikro kecil dan menengah yang ada di Kalimantan Tengah sebanyak 298.979 unit usaha (lokasi usaha menetap dan tidak menetap). Apabila dibandingkan antara potensi yang ada dengan data dan UMKM yang difasilitasi, tentunya terlihat perbedaan yang signifikan. Meskipun demikian, capaian UMKM yang difasilitasi tersebut (sehingga tercipta peningkatan daya saing UMKM) sudah memenuhi target .

c. Kurang Sinergitas antar SKPD dan Dengan Stakeholders lain

Bahwa mewujudkan UMKM yang mandiri, berdaya saing serta mapan seringkali membutuhkan pendekatan yang berkelanjutan serta meliputi berbagai aspek usaha seperti penguatan dalam bidang permodalan, SDM, produksi, keuangan, pemasaran, ketersediaan bahan baku, jaringan usaha serta perijinan.

Dengan berbagai keterbatasan yang ada Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Tengah tidak akan mampu untuk memberikan fasilitasi secara menyeluruh untuk

seluruh aspek pengembangan usaha, selain itu akan terkait juga dengan Tupoksi dari SKPD lain. Apabila pengembangan UMKM akan dilakukan secara holistik tentunya berbagai SKPD serta stakeholder harus duduk bersama untuk menyeleraskan kontribusi apa yang dapat diberikan selain itu hal ini dapat menghindari tumpang tindihnya pemberian fasilitasi bagi UMKM tertentu.

Melihat proses penyusunan anggaran saat ini, modus umumnya setiap SKPD melakukan penyusunan program dan kegiatan masing-masing sehingga fasilitasi yang diberikan bagi UMKM bersifat parsial dan belum mampu memenuhi kebutuhan pengembangan usahanya.

2. Penjelasan Faktor Pendorong

a. Adanya Komitmen Yang Kuat Pengembangan KUMKM

Dengan memperhatikan berbagai kebijakan pembangunan yang ada seperti RPJMD dan RKPD, pembangunan KUMKM merupakan salah satu bidang yang diprioritaskan dalam pembangunan

b. Banyaknya Perbankan dan Pengusaha Besar yang terdapat di Kalimantan Tengah

Dengan banyaknya jumlah perusahaan besar dibidang perkebunan, pertambangan di Kalimantan Tengah tentunya dapat mendorong terjadinya peningkatan transaksi ekonomi di Kalimantan Tengah, selain itu guna memperkuat eksistensi keberadaan perusahaan serta sebagai salah satu bentuk kepedulian sosial dan lingkungan, berbagai perusahaan tersebut diharapkan dapat terus meningkatkan program, CSR / PKBLnya

c. Tingginya Jumlah dan Aktivitas Pelaku Usaha

Perkembangan Sektor Ekonomi Unggulan Daerah berbasis kearifan lokal di Kalimantan Tengah dari tahun ke tahun menunjukkan trend yang semakin meningkat.

Sektor Ekonomi Unggulan Daerah berbasis kearifan lokal memiliki prospek yang baik dalam penciptaan lapangan kerja di masa yang akan datang mengingat Kalimantan Tengah memiliki potensi Sumber Daya alam yang besar/melimpah tercermin dari jumlah penduduk lokal sedikit dan banyaknya pendatang.

3.3. TELAHAH RENSTRA K/L

Pada dasarnya, penetapan Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Tengah merupakan bentuk pengembangan dari Visi dan Misi yang telah ditetapkan sebelumnya. Dikaitkan dengan Renstra kementerian/lembaga maupun renstra Kabupaten/kota Kebijakan Program dan Kegiatan Kementerian :

Visi	Menjadikan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM) Sehat dan Kuat
Misi	Misi Memberdayakan Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, memperluas kesempatan kerja dan menurunkan jumlah kemiskinan dalam rangka mewujudkan Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan
Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan jumlah dan peran koperasi dan UMKM dalam Perekonomian nasional. 2. Peningkatan pemberdayaan koperasi dan UMKM. 3. Peningkatan daya saing produk koperasi dan UMKM. 4. Peningkatan pemasaran produk Koperasi dan UMKM. 5. Meningkatkan akses pembiayaan Koperasi dan UMKM. 6. Pengembangan wirausaha Koperasi dan UMKM. 7. Perbaikan iklim usaha yang lebih berpihak kepada Koperasi dan UMKM.

Sasaran Strategis	Target Kinerja
Subtansi Pemberdayaan Koperasi dan UMKM:	
1) Peningkatan jumlah dan peran Koperasi dan UMKM dalam perekonomian nasional;	a. Terwujudnya 4.000 koperasi berkualitas
2) Peningkatan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM;	b. Terwujudnya 1.500 peserta bimbingan teknis perkoperasian dan tata kelola perusahaan kepada pembina/UMKM/koperasi di sektor riil
3) Peningkatan daya saing produk UsahaKecil dan Menengah;	c. Terwujudnya 18.500 Badan Hukum Koperasi yang diumumkan dalam Berita Negara RI
4) Pengembangan kemitraan Usaha Kecil dan Menengah;	d. Terwujudnya Tenaga Penyuluh yang Terekrut dan Terlatih sebanyak 1.425 orang di 15 Propinsi.
5) Peningkatan produksi dan pemasaran produk Usaha Kecil dan Menengah;	e. Terwujudnya 900 Koperasi yang direvitalisasi.
6) Penyediaan akses pembiayaan KUMKM;	f. Terlaksananya Kajian / Rintisan / Replikasi / Publikasi, Pengembangan Teknologi
7) Pengembangan wirausaha Koprerasi dan usaha Kecil dan Menengah; Perbaikan iklim usaha yang lebih berpihak pada KUMKM	g. Informasi Pengkajian dan Partisipasi pada Forum Kerjasama Internasional dalam
	h. Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.
	i. umlah 3.085 KUMK yang memahami dan menerapkan standarisasi manajemen mutu, hak kekayaan intelektual (HKI), dan kehalalan produk;
	j. Jumlah 1.272 KUKM yang mendapatkan fasilitasi kerjasama investasi dan Perusahaan Pasangan Usaha – Lembaga Modal ventura Daerah (PPU-LMVD);
	k. Jumlah 795 KUMKM Sentra yang difasilitasi bimbingan dan konsultasi pemanfaatan e-commerce dan aplikasi sistem bisnis ;
	l. Meningkatnya jumlah dan kualitas sarana produksi KUKM sebanyak 372 Koperasi
	m. Meningkatnya jumlah koperasi dalam pengembangan energi terbarukan sebanyak 80 Koperasi
	n. Tersusunnya konsep model pemberian insentif dalam rangka peningkatan kualitas produksi KUMKM sebanyak 10 konsep Model
	o. Jumlah KUMKM yang difasilitasi pameran dalam dan luar negeri 5.230 KUMKM
	p. Jumlah KUMKM yang difasilitasi melalui temu mitra 8.525 KUMKM
	q. Jumlah Dukungan Revitalisasi sarana dan prasarana pemasaran melalui koperasi 241 unit
	r. Jumlah PKL yang difasilitasi kepastian tempat usaha 13.891 UMKM.
	s. Meningkatnya jumlah KUKM yang terlayani Usaha Kecil dan Menengah Nasional.
	t. Peningkatan akses pendanaan bagi usaha mikro dan kecil melalui 100 Koperasi.
	u. Penilaian kesehatan bagi 126 KSP/KJKS/UJKS Primer nasional.
	v. Transformasi 300 LKM menjadi badan hukum Koperasi.
	w. Peningkatan permodalan bagi 3.395 Koperasi perdesaan dan perkotaan.
	x. Bantuan Start-Up Capital bagi 4.328 Wirausaha Pemula

3.4. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Dalam konteks Pembangunan Nasional dari Aspek Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Kalimantan Tengah belum ditetapkan.

Dengan adanya peningkatan infrastruktur terutama sarana transportasi berkenaan, oleh karenanya merupakan peluang atau potensi daerah yang harus dikemas dalam penataan dan pengelolaannya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berwawasan lingkungan.

Potensi lainnya berupa banyaknya pelaku ekonomi yang terpecah di wilayah Kabupaten/Kota dengan jumlah yang setiap tahun bertambah sehingga belum tertangani secara optimal terutama sektor informal dan merupakan potensi ekonomi yang memiliki nilai tambah tinggi apabila berbasis ilmu Pengetahuan, Teknologi, Kreatif, Inovatif serta dapat menyerap tenaga kerja dan mengurangi Kemiskinan.

Kendala yang dihadapi saat ini adalah :

- a. Terbatasnya kemampuan enterpreneur SDM Koperasi.
- b. Terbatasnya jaringan usaha, Lemahnya kemampuan mengakses sumber permodalan bagi KUKM
- c. Belum memadai peralatan produksi.
- d. Belum optimalnya kemampuan desain dan packaging.
- e. Terbatasnya pemasaran produk KUMKM dan IKM.
- f. Kurangnya sarana dan prasarana bagi sentra industri.
- g. Keterbatasan dana sehingga pembinaan yang dilakukan kurang maksimal.
- h. Belum tersosialisasinya sistem Online prosedur dokumen ekspor.
- i. Organisasi PKL belum teroganisir secara formal.